

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI PADA
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2010-2013**

(Tesis)

Oleh
NINA NOVARIANTI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
PEMEDIASI PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2010-2013**

Disusun Oleh :

Nina Novarianti

ABSTRAK

Pembangunan manusia Indonesia masih harus ditingkatkan. Hal ini tercermin dari laporan bertajuk "*Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience*" yang diluncurkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) (Tribunnews, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. Penelitian ini mengambil populasi kabupaten/ kota se Indonesia. Dari metode *purposive sampling* diperoleh 435 kabupaten/ kota di Indonesia sebagai sampelnya selama periode 2010-2013. Analisis menggunakan analisis jalur, dengan dua model persamaan. Model pertama menguji pengaruh langsung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Dan Substruktural kedua menguji pengaruh langsung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil test statistik pada model pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Model kedua menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan Analisis jalur ditemukan bahwa Belanja modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia.

*EFFECT OF REVENUE REGIONAL GENERAL ALLOCATION FUND AND
SPECIAL FUND ALLOCATION OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX WITH
VARIABLE CAPITAL EXPENDITURES AS PEMEDIASI ON DISTRICT / CITY
IN INDONESIA 2010-2013*

by :

Nina Novarianti

ABSTRACT

Indonesian human development must still be improved. This is reflected in the report entitled "Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience" launched United Nations Development Programme (UNDP) (Tribunnews, 2014). This study aims to demonstrate empirically the effect of PAD, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on the Human Development Index through the Capital Expenditure. This study takes the population of districts / cities in Indonesia. Purposive method sampling obtained from 435 districts / cities in Indonesia as sampled during the period 2010-2013. Analysis using path analysis, with two models of the equation. The first model to test the direct effect of revenue regional, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Capital Expenditure. And the second Substruktural examine the direct effect of revenue regional, General Allocation Fund, Special Allocation Funds and Capital Expenditure on Human Development Index. Statistik test results on the first model shows that revenue regional, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund positive effect on Capital Expenditure. The second model shows that, revenue regional, General Allocation Fund, and capital expenditure is a positive influence on the Human Development Index, while the Special Allocation Fund negative influence on the Human Development Index. With path analysis found that capex will mediate the effect of regional revenue and Special Allocation Fund on the Human Development Index.

Keywords: Revenue Regional, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure and Human Development Index.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI PADA
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2010-2013**

Oleh

NINA NOVARIANTI

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar
Magister Ilmu Akuntansi**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

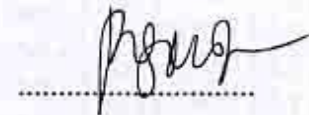
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

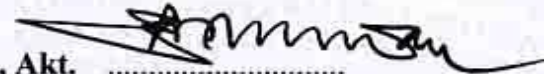
Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002



4. Tanggal Lulus Ujian : **19 Februari 2016**

Judul Tesis : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI PADA
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2010-2013**

Nama Mahasiswa : **Nina Novarianti**

No. Pokok Mahasiswa : 1321031020

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi


Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

Pigo Nauli, S.E., M.Si.
NIP 19820623 200812 1 001

2. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi


Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemeditasi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2013” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik etika atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2016

Pembuat Pernyataan,



Npm 1321031020

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Pada 20 November 1982, sebagai anak pertama dari lima bersaudara pasangan Bapak Rukiyo Aryanto dan Ibu Sukci Herdani.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) di TK. Dolog Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 1988. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan penulis tahun 1994 di SD Negeri 2 Sumur Batu Bandara Lampung. Tahun 1997, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan pada tahun 2000 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Pada tahun 2000, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Program studi S1 Akuntansi dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada tahun 2005. Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya, kupersembahkan tesis ini dengan segala kerendahan hati untuk setiap orang yang berharga dalam hidupku, yang mencintai dan menyayangiku dengan penuh ketulusan, atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini serta doa yang tiada henti kepada :

1. Suamiku tercinta dan buah hati kami si kecil Najib, yang selalu mendukung ku baik moral maupun materiil. Dan terimakasih buat kesabarannya menunggu ku menyelesaikan kuliah,
2. Bapak dan Mama tercinta, terimakasih untuk semua yang telah kalian berikan serta doa yang tak pernah henti untuk kesuksesanku.
3. Keluarga besar yang selalu mendukungku.
4. Sahabat sahabat terbaik , terimakasih buat kebersamaan dan dukungannya selama penyelesaian tesis ini.
5. Almamater tercinta.

MOTO

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu”

(HR. Turmudzi)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

“Jangan terlalu risau apa yang tidak kita miliki, risaulah apabila hati tidak bersungguh sungguh mensyukuri setiap pemberian- Nya”

“Seseorang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya” (HR. Muslim)

“Barangsiapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di Akherat” (HR. Muslim)

“Kadang usahamu berbuah, kadang tidak, apapun hasilnya tetap percaya diri di setiap usaha”

SANWACANA

Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemeditasi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2013” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini Penulis ini mendapatkan banyak pembelajaran, petunjuk, saran, dan kritik dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D., Akt. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Dr.Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran, pengarahan, serta dukungan pengalaman selama proses kuliah dan penyusunan tesis;

4. Bapak Pigo Nauli S.E., M.Sc. selaku pembimbing Pendamping atas kesediaan memberikan bimbingan, bantuan, saran, perhatian, dan waktunya selama penyusunan tesis;
5. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama pada Ujian Tesis yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun pada saat seminar dan ujian;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman;
7. Suamiku tercinta, Anton Fathoni, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil, dan kesediannya memberikan waktu bagiku untuk kembali menempuh pendidikan ini;
8. Anakku tersayang, buah hati kami, Najib Anin Maulana, yang selalu menjadi motivator dalam hidupku, si guru kecil tempat aku belajar keasabaran, dan penggugur setiap lelah dan jenuhku;
9. Mama, Bapak, dan Ibu Mertua yang senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang yang berlimpah, perhatian, nasehat, semangat dan doa serta dukungan yang tiada henti;
10. Adik-Adikku, Andi, Esti, Anto, dan Meiru, untuk semua cinta dan dukungan tulus bagiku;
11. Keluarga MIA angkatan 4, Linda, Devi, Meta, Octa, Ayu Riani, Dwi, Mbak Nyimas, Mbak Rahma, Edwin, Bayu, Lawe, dan keluarga Mia lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, semangat, kerjasama, dan pengalaman yang tak terlupakan ini;

12. Andri, Ayin, Mba Leni, Mbak Tina, Mas Jaya, Mas Dwi, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu bersedia membantu kelancaran perkuliahan dan penyusunan tesis;
13. Terima kasih untuk orang-orang yang telah memberikan inspirasi dan motivasi, dan orang-orang yang terlewat disebutkan tetapi memiliki arti yang sama pentingnya bagi kehidupan saya serta semua pihak yang turut mendukung penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis

Nina Novianti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	.ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Pemasalahan.....	8
1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.3 Dana Perimbangan.....	14
2.1.3.1. Dana Alokasi Umum.....	15
2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus.....	17
2.1.3.3 Dana Bagi Hasil.....	22
2.1.4. Belanja Modal.....	22
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Rerangka Pemikiran.....	29
2.4 Perumusan Hipotesis.....	30

BAB III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5 Variabel Penelitian.....	39
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
3.7 Metode Analisis.....	41
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
3.7.2 Uji Normalitas Data.....	41
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.4 Uji Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.2. Analisis Data.....	48
4.2.1. Analisis Deskriptif.....	48
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.1. Uji Normalitas Data.....	50
4.3.2. Uji Multikolinieritas.....	52
4.3.3. Uji Autokorelasi.....	54
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.4. Pengujian Hipotesis.....	57
4.4.1. Uji F.....	57
4.4.2. Koefisien Determinasi.....	59
4.4.3. Uji t.....	61
4.4.4. Analisis Jalur.....	64
4.4.5. Hasil Uji Hipotesis.....	66
4.5. Pembahasan.....	70
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Implikasi Penelitian.....	81
5.3 Keterbatasan.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	iv
LAMPIRAN.....	v

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1.Peringkat IPM Negara Negara ASEAN Tahun 2013.....	2
2.1. Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
4.1. Penentuan Jumlah Sampel.....	47
4.2.Hasil Uji Statistik deskriptif.....	48
4.3.Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
4.4. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (1)	51
4.5. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (2)	52
4.6. Hasil Uji Multikolinearitas (1).....	53
4.7. Hasil Uji Multikolinearitas (2).....	54
4.8. Hasil Uji Autokorelasi (1).....	55
4.9. Hasil Uji Autokorelasi (2).....	55
4.10. Uji F Model Regresi I.....	58
4.11. Uji F Model Regresi 2.....	58

4.12. Koefisien Determinasi Model Regresi 1.....	59
4.13. Koefisien Determinasi Model Regresi 2.....	60
4.14. Uji t Model Regresi 1.....	61
4.15. Uji t Model Regresi 2.....	62
4.16. Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Jalur.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Trend Komposisi Pendapatan Daerah TA 2009-2013.....	5
2.1. Rerangka Pemikiran.....	30
4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot (1).....	56
4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot (2).....	57
4.3. Hasil Perhitungan Analisis Jalur	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia Indonesia masih harus ditingkatkan. Hal ini tercermin dari laporan bertajuk “*Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience*” yang diluncurkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) (Tribunnews, 2014).

UNDP menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada tahun 2013 sebesar 0.684. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0.44 persen bila dibandingkan dengan skor IPM pada tahun 2012 sebesar 0.681. Meski mengalami kenaikan, peringkat IPM Indonesia tetap berada di urutan 108 dari 287 negara. Indonesia juga belum beranjak dari kelompok medium dalam soal pembangunan manusia. Di regional ASEAN, Indonesia berada pada kelompok yang sama dengan Filipina, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Laos. Progres Indonesia dalam soal pembangunan manusia dinilai sedikit lambat. Sepanjang periode 2000-2013, pertumbuhan skor IPM Indonesia rata-rata sebesar 0.9 persen pertahun. Progres yang lambat juga tercermin dari perubahan peringkat IPM Indonesia sepanjang periode 2008-2013 yang hanya naik empat peringkat. Seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara Negara ASEAN
Tahun 2013

No	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan Peringkat IPM 2008-2013	Rata rata pertumbuhan (%) 2000-2013	Kelompok
1.	Singapura	0.901	9	14	0.92	Very high
2.	Brunei Darussalam	0.852	30	2	0.27	Very high
3.	Malaysia	0.773	62	1	0.58	High
4.	Thailand	0.722	89	3	0.83	High
5.	Indonesia	0.684	108	4	0.90	Medium
6.	Filipina	0.660	118	-1	0.49	Medium
7.	Vietnam	0.638	121	2	0.81	Medium
8.	Timor Leste	0.620	128	5	2.25	Medium
9.	Kamboja	0.584	136	-1	1.75	Medium
10.	Laos	0.569	139	3	1.44	Medium
11.	Myanmar	0.524	150	0	1.64	Medium

Sumber : UNDP, 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (ppp).

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan

oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam misi Presiden yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

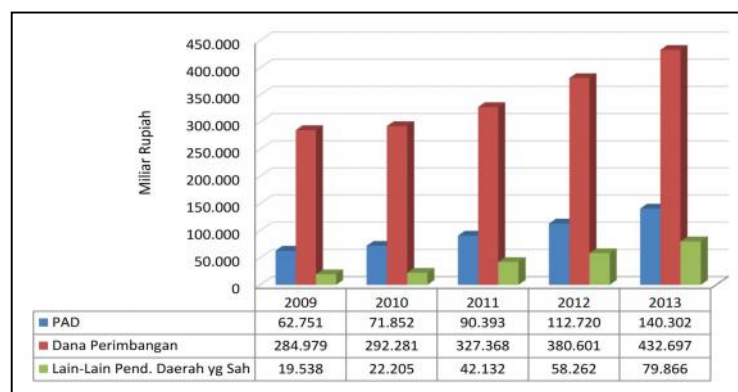
Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai (Marhaeni, dkk, 2008).

Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan. Sejalan dengan peningkatan pelayanan itu dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Otonomi Daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil sehingga salah satu indikator pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihipotesiskan akan meningkat pula (Rondinelli dan Cheema, 1983; Davoodi dan Zou, 1998; Syaukani dan Rasyid, 2001; Fisman dan Gatti, 2002; Devas dan Grant, 2003). Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi (otonomi daerah) adalah permasalahan desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (*horizontal imbalance*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut ini merupakan grafik Trend Komposisi Pendapatan daerah tahun 2009-2013.

Gambar 1.1
Trend Komposisi Pendapatan Daerah TA 2009 – 2013 (dalam miliar rupiah)



Sumber :BPS, 2014

Secara nasional porsi dana perimbangan masih dominan setiap tahunnya, akan tetapi terlihat laju peningkatannya lebih rendah bila dibandingkan laju peningkatan PAD. PAD terus mengalami peningkatan, dimana rata-rata peningkatan dari tahun 2009 hingga 2013 adalah sebesar 22.4%, sedangkan rata

rata peningkatan Dana perimbangan dari tahun 2009 hingga 2013 di kisaran 11.1%. Kondisi ini ternyata belum sesuai dengan peningkatan IPM di Indonesia.

Berbagai teori mengenai kemungkinan dampak desentralisasi terhadap IPM telah dibahas oleh Scott (2006) dan Brassard (2008). Brata (2005) menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta dan distribusi pendapatan proksi Indeks Gini terhadap IPM dalam konteks regional (antarprovinsi) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia, variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap IPM dan variabel Indeks Gini berpengaruh positif terhadap IPM.

Christy dan Adi (2009) meneliti kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (2004-2006) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya, Syahril (2011) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Lugastoro (2013) di Jawa Timur menemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

Setyowati dan Suparwati (2012), menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), sedangkan DAU, DAK, dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diprosikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia, terdapat pula penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), yang menyimpulkan bahwa hanya PAD dan DAU yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Darmayasa (2014) menemukan bukti empiris bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal namun Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Jiwatami (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemediasi. Upaya perbaikan penelitian juga dilakukan dengan memperbaharui model penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan meneliti pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. Sedangkan untuk variabel

Dana Alokasi Umum penulis hanya meneliti pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan pertimbangan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini beralasan karena Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang alokasinya cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah (jiwatami dan Wandira, 2013). Dan komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS Daerah) (Kusnandar dan Siswanto, 2011).

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Belanja Modal. Sehingga pertanyaan riset yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?

5. Apakah Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
6. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
7. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai pemediasi ?
8. Apakah Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai pemediasi ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Belanja Modal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diasumsikan akan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut Scott (2011), asimetri informasi dibedakan menjadi dua, yakni *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau orang dalam perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi kepada investor sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengatasi permasalahan *adverse selection*, manajer harus menyebarkan informasi dalam kepada pihak lain secara bersamaan dan merata. Sedangkan *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi di mana ada

pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Pemilik dan kreditor tidak mungkin dapat secara langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. Ada dua cara untuk mengendalikan masalah *moral hazard*, yaitu: (1) laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kompensasi manajer dan (2) laba bersih dapat menggambarkan kondisi pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja perusahaan sehingga manajer yang lalai akan mengakibatkan laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajer yang jelek dan nilai pasar sekuritasnya menurun. Asimetri informasi tersebut akan menyebabkan munculnya masalah fundamental teori akuntansi keuangan, yaitu tentang bagaimana melakukan rekonsiliasi perbedaan relevansi dan reliabilitas informasi akuntansi. Informasi yang relevan adalah informasi yang membuat investor mampu untuk menilai prospek ekonomi masa depan perusahaan. Sedangkan informasi yang reliabel adalah informasi yang bebas dari bias atau manipulasi manajemen.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan

pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014, yaitu :

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas

jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifat budgetairnya tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu, retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat

yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.1.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dana perimbangan dibagi menjadi:

2.1.3.1 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antartingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

2.1.3.1.2 Alokasi Dana Alokasi Umum

- DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN.
- Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbang kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.3.1.3 Tahap Penghitungan Dana Alokasi Umum

1. Tahapan Akademis Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang

sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.3.1.4 Metode Penghitungan DAU

1. Formula DAU Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU

$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$

Dimana :

$AD = \text{Gaji PNS Daerah}$

$CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$

2. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

3. Celah Fiskal (CF) Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.2.1 Pengerian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena

merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

1.1.3.2.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

1. Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

4. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

5. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3.2.3 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

- DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau pulau kecil.
- DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
- DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan

provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

- DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.
- DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan

pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor/bupati/ walikota, dan pembangunan/ perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

- DAK Lingkungan hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.
- DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
- DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan, yang ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.
- DAK Perdagangan, yang diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta

daerah pasca bencana.

2.1.3.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang bersifat *block grants* seperti DAU sehingga pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah *block grants* sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (*earmarking*). Komponen tersebut antara lain DBH Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi yang digunakan untuk RHL (rehabilitasi hutan dan lahan).

2.1.4 Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (Marhaeni, et al., 2008). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya

bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Menurut Human Development Report (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

1. Indeks angka harapan hidup ketika lahir.
2. Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih.
3. Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Temuan
1	Christy dan Adi (2009)	Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia	DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia
2	Syahril (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada	Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Belanja Modal tidak

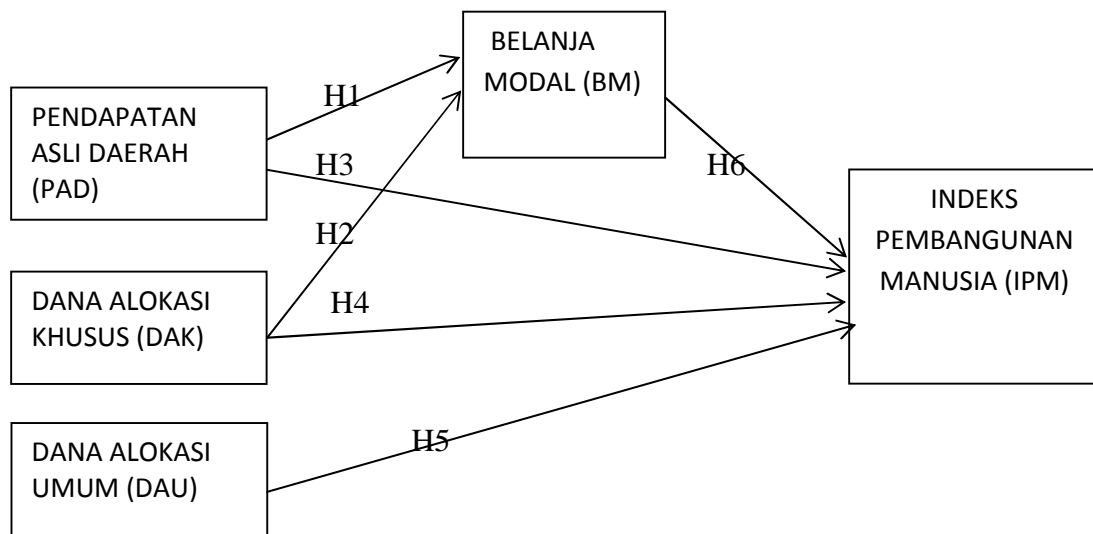
		Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan
3	Setyowati dan Suparwati (2012)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), sedangkan DAU, DAK, PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4	Lugastoro (2013)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM di Jawa Timur	PAD dan DAK terhadap IPM berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.
5	Jiwatami (2013)	Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)	Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif.
6	Darmayasa (2014)	Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD	bahwa DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (DBH dan DAU merupakan

			faktor penentu alokasi Belanja Modal), namun PAD, DAK dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (bukan merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal).
7	Sumardjoko (2014)	Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening	dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal APBD Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat periode tahun 2002-2012, belanja modal berperan sebagai variabel intervening dalam memberikan pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia

2.3 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan review literatur yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini adalah pengujian secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun melalui Belanja Modal sebagai pemediasi. Berikut rerangka penelitian dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Semakin baik Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi Belanja Modalnya (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013). Hal serupa diungkapkan oleh Brata (2004) bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Penelitian oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat keyakinan 99% ($\alpha = 1\%$). Walaupun persentase Pendapatan Asli Daerah cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah lebih leluasa dalam merencanakan

dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Penelitian lainnya dengan kesimpulan sejenis dilakukan oleh Kartika dan Dwirandra (2014). Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik yang mana semua hal tersebut dialokasikan melalui belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Secara umum, DAK menyerupai dana inpres (Instruksi Presiden) yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Penelitian oleh Oktriniatmaja (2011) menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal tersebut tidak lain karena sesuai UU No.33 Tahun 2004 pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membangun sarana dan prasarana fisik yang tentunya atas kegiatan tersebut dianggarkan melalui belanja modal. Kesimpulan serupa diutarakan oleh Wandira (2013) yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah berupa dana perimbangan

(transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Syahril, 2011). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Purbadharmaja, 2013). Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur (Lugastoro, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Hidayawati, 2011). Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk

mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008).

Alokasi DAK untuk kegiatan pendidikan dibagi menjadi dua yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahun 2013, Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk bidang pendidikan sebesar Rp.10,1 Triliun. Dana ini dibagi menjadi empat, yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar 35%, Sekolah Menengah Pertama sebesar 25%, Sekolah Menengah Atas sebesar 16% dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 24% (Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

DAK mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur (Lugastoro, 2013). Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Intisari, 2011). DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur (Lugastoro, 2011). Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Irwanti, 2014). Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H5: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja Modal (BM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Syahril, 2011). Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Christy.Adi, 2009). Hal serupa diungkapkan oleh setyowati dan Suparwati (2012) menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H6 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.7 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

PAD sebagai pengukur pendapatan daerah sendiri sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, 2006). Syahril (2011) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Setyowati dan Suparwati (2012) menemukan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diporsikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut:

H7: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM) sebagai pemediasi .

2.4.8 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

Setyowati dan Suparwati (2012), menemukan bahwa DAK terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM). Lugastoro (2013) menemukan

bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut :

H8 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM) sebagai pemediasi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

3.2 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se- Indonesia tahun 2010-2013.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 1999). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method* (Ghozali, 2012). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2010-2013.
2. Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten selama 2010-2013.

3. Memiliki data lengkap dan konsisten berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah :

1. Data Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2013, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal.
2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dirjen

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka angka, dan bersifat obyektif.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu gejala yang bervariasi. Variabel juga dapat diartikan sebagai obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian dari suatu penelitian (Arikunto: 1998: 99). Variabel dalam penelitian ini antara lain :

- a. Variabel Independen terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- b. Variabel dependen : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- c. Variabel Pemediasi : Belanja Modal (BM)

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya (Sularso, 2003).

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota/kabupaten di Indonesia, diukur dalam satuan jutaan rupiah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dalam penelitian ini adalah realisasi Dana alokasi Umum Kota/kabupaten di Indonesia, diukur dalam satuan jutaan rupiah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Alokasi Khusus Kota/kabupaten di Indonesia, diukur dalam satuan jutaan rupiah.
4. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja Modal dalam penelitian ini adalah realisasi Belanja Modal Kota/kabupaten di Indonesia, diukur dalam satuan jutaan rupiah.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu: 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir. 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin

atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih). 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah). IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut.

3.7 Metode Analisis

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai responden atau data variabel yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi.

3.7.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik yaitu dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Data akan normal jika signifikansinya $< \alpha = 0,05$. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat bebas dari asumsi klasik, dimana data tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas untuk menguji korelasi antara variabel bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflasi Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai *tolerance* di atas 10%. Pada umumnya jika VIF lebih besar daripada 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya.

2. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedasitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedasitas.

3. Uji Auto Korelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan model Durbin Watson (*dw test*). Autokorelasi adalah keadaan dimana *variabel error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan *variabel error-term* pada periode lain yang bermakna *variabel error-term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Langkah pendeteksiannya adalah dengan membandingkan nilai *Durbin Watson Statistic Table* dengan H_0 tidak ada autokorelasi bila DW berada di : 0 (a) dl (b) du (c) (4-du) (d) (4-dl) (e) 4

H_0 = tidak ada autokorelasi (a) = daerah menolak H_0 = ada autokorelasi positif (b) = daerah ragu-ragu (c) = daerah tidak menolak H_0 = tidak ada auto korelasi positif atau negatif (d) = daerah ragu-ragu (e) = daerah menolak H_0 = ada autokorelasi negatif.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji F

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen. Model *goodness of fit* bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau *fit*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai F. Jika hasil Fhitung > Ftabel maka model yang dirumuskan sudah tepat

(*goodness of fit*) (Ghozali, 2009:88). Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5% atau 1%. Jika probabilitas yang ditunjukkan $> 5\%$, maka model ditolak, sedangkan jika $< 5\%$, maka model diterima.

3.7.4.2 Koefisien Determinasi (R Squared)

Koefisien Determinasi (*R Squared*) menunjukkan seberapa besar prosentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Jika R^2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Hal ini semakin tepat garis regresi tersebut mewakili hasil penelitian yang sebenarnya (Ghozali, 2009).

3.7.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan *level of significant* (α) 0,05. Hal ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan harga yang terletak di daerah kritis (daerah tolak) apabila hipotesis benar sebesar 0,05. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dan sebaliknya (Ghozali, 2009). Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan ukuran 5% atau 1%.

3.7.4.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi linear. Model *Path Analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel yang berbentuk sebab akibat. Dengan demikian dalam model hubungan antara variabel eksogen (*Exegonous*), dan variabel dependen yang disebut variabel Endogen (*Endogonous*) (Sugiyono, 2007) .

Analisis Jalur ingin menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen sekaligus sehingga memungkinkan pengujian terhadap variabel *mediating/intervening* atau variabel antara. Disamping itu analisis jalur juga dapat mengukur hubungan langsung antar variabel dalam model maupun hubungan tidak langsung antar variabel dalam model. Hubungan langsung antar variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dilihat pada koefisien beta. Hubungan tidak langsung adalah seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel *intervening* atau pemediasi. Pengaruh total dapat diperoleh dengan menjumlahkan hubungan langsung dan tidak langssung (Imam Ghozali, 2008).

Persamaan regresi dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu:

Tahap 1 :

$$BM_{it} = \beta_1 + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon$$

Tahap 2

$$IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 BM_{it} + \varepsilon$$

Dimana :

BM =Belanja Modal

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PAD= Pendapatan Asli Daerah

DAU= Dana alokasi Umum

DAK = Dana alokasi khusus

Analisis regresi dengan variabel intervening digunakan untuk mengetahui total pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yang terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, yakni melalui variabel intervening, dengan rumus (Ghozali, 2011):

Pengaruh langsung : p_1

Pengaruh tidak langsung : $p_2 \times p_3$

Total pengaruh : $p_1 + (p_2 \times p_3)$

Apabila nilai total pengaruh lebih besar daripada pengaruh langsung berarti variabel tersebut merupakan variabel *intervening*.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

5.1 Simpulan

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal pada kabupaten/kota se Indonesia .

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik maupun pembahasan komprehensif berdasar fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam model substruktural II, pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sudah berkurang.
2. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi antara lain:

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berkaitan dengan penggunaan anggaran berasal dari pendapatan asli daerah, yang merupakan pendelegasian dari rakyat kepada pemerintah agar dapat digunakan sebaik baiknya demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sehingga Dan dana transfer berupa DAU dan DAK dari pemerintah pusat lebih dimanfaatkan pada hal- hal produktif demi kesejahteraan rakyat.
3. Bagi penulis, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai variabel pemediasi.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian berikutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti variabel keuangan tanpa memperhitungkan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel non keuangan.
2. Berdasarkan hasil uji statistik, dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia secara langsung. Hal ini disebabkan hampir seluruh bidang DAK cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang. Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk menggunakan IPM tahun berikutnya ($t+1$).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi STE1*No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
- Amalia F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja.2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3, No. 6
- Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya, 2010- 2012*. <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 20 Nov 2014.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 dan Hasil Monev. Jakarta 5 Maret 2013.
- Brassard, C. 2008. Decentralization, Democratization and Development in Bhutan. *Working Paper*, February, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
- Brata, A.G. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian-Universitas Atma Jaya.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Darmayasa, 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD. Simposium Nasional Akuntansi. September 2014.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Davoodi, H. & Zou, H.F. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43: 244-257.

- Devas, N. & Grant, U. 2003. Local Government Decision-Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*, 23.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2010. *LGF Realisasi (Annual)*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada 20 November 2014.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *LGF Realisasi (Annual) update per 3 November 2012*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 20 November 2014.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *LGF Realisasi (Annual) update per 20 Oktober 2013*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 20 November 2014.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *LGF Realisasi (Annual) update per 20 Oktober 2013*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 20 November 2014.
- Fisman, R. & Gatti, R. 2002. Decentralization and Corruption: Evidence across Countries. *Journal of Public Economics*, 83: 325–345.
- Gilardi. 2001. *Principal Agent Models Go To Europe : Independent Regulatory Agencies s Ultimate Step Of Delegations*. Paper Presented at ECPR General Conference Canteburry. 6-8 September 2001.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 Edisi 6*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayawati, Nurul. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFY Yogyakarta.
- Intisari. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY tahun 2008-2010*. Tesis.
- Irwanti. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua tahun 2008-2012*. Tesis.
- Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Jiwatami. 2011. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012).

- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Kusnandar, & Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV
- Lugastoro, Dectra Pitron. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur* (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat
- Marhaeni, Harmawanti; Sri Yati dan Bambang Tribudhi M. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008*.
- Pambudi, Septian. 2008. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. [http: wwwrepository.usu.ac.id/bitstream](http://www.repository.usu.ac.id/bitstream). Diakses pada tanggal 21 November 2014.
- Rini, Oktriniatmaja. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara* (Tesis).
- Rondinelli, D.A. & Cheema, G.S. 1983. *Implementing Decentralization Policies: An Introduction*, in *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, edited by G.S. Cheema & Rondinelli, D.A., Beverly Hills, California, Sage.
- Scott, T. 2006. *Decentralization and Human Development: Findings and Recommendations from a Review of National Human Development Reports*. United Nations Development Programme, National Human Development Report Unit, Bureau for Development Policy.
- Scott, William R. 2011. *Financial Accounting Theory*, 6th Edition, USA: Prentice Hall.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja*

Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi* Vol. 9 No. 1.

- Sumardjoko, Imam. 2013. *Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Lombok
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabetha.
- Sularso, Sri. 2003. *Buku Pelengkap Metod ePenelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*, BPFE-Yogyakarta.
- Syahril. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Syaukani, A.G. & Rasyid, R. (2001), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 1 (3) : 45-5
- Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Tribunnews. 2014. *Rilis UNDP : Peringkat Pembangunan Manusia Indonesia Jalan Ditempat*. <http://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 25 Nov 2014.
- UNDP. 2004. *Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia*. <http://www.undp.or.id>, diakses pada tanggal 20 Nov 2014.
- Vonhagen. 2003. Fiscal Rules, Fiscal, Institution, and Fiscal Performance. *The Economic and Social Review*.